

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2020



2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya jualah dapat disusun sekaligus diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022. Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pangkalpinang, Maret 2021

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Visi Gubernur beserta Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah ***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.***

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang yang tersedia, maka tujuan jangka menengah pembangunan Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Perindustrian dan Perdagangan:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri
2. Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu
4. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020. Sasaran tersebut adalah:

1. Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah
2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan
3. Meningkatnya Nilai ekspor
4. Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
5. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha
6. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
7. Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Capaian kinerja indikator lainnya akan dijelaskan secara terperinci pada BAB III.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, tahun 2020 Anggaran Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 27.120.466.359,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 12.285.197.779,00 dan belanja langsung sebesar Rp 14.835.268.580,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2020, anggaran Perindustrian dan Perdagangan menjadi Rp 21.997.113.949,00 (mengalami Refocusing sebesar Rp 5.123.352.410,00 atau 18,89%) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 11.984.610.979,00 dan belanja langsung sebesar Rp 10.012.502.970,00. Total Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 20.601.008.196,00 atau 93,65% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 11.656.561.724,00 atau 97,26% dan Belanja Langsung Rp 8.944.446.472,00 atau 89,33 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.396.105.753,00 atau 6,35%. Sedangkan dana APBN berupa dana Dekonsentrasi dengan total pagu anggaran Rp 2.235.991.000,00 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 2.055.501.707,00 atau 91,93%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
B A B I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD.....	6
1.3.2.1 Sumber Daya Manusia.....	6
1.3.2.2 Asset SKPD	7
1.3.3 Sistematika Penulisan	7
B A B II.....	8
PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8
Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	12
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	17
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	18
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan	19
2.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	21
B A B III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. CAPAIAN KINERJA	29
3.2. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA	36
3.3. REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV.....	48
PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	49

LAMPIRAN	50
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	51
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64
Daftar Aset	90

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka dalam upaya mengimplementasikan pelaksanaan **Azas Akuntabilitas**, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Inpres 7/1999 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah: 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah/OPD yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam hubungan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu perangkat Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2020 yang mengacu pada program rencana pembangunan jangka menengah daerah yang didanai baik dari APBD maupun dana lainnya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar penetapan kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Sebagai perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan atas dasar mandat yang telah diberikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala UPTD, 5 (lima) orang Kepala Sub Bagian dan 16 (enam belas) orang Kepala Seksi.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri, membawahkan:
 - Seksi Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Industri;
 - Seksi Pengembangan Sumber daya Alam dan Teknologi Industri;
 - Seksi Fasilitasi dan Akses Industri.
- d. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri, membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Wilayah Industri;
 - Seksi Informasi dan Perizinan Industri;
 - Seksi Pengawasan Industri.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahkan:
 - Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
 - Seksi Tertib Niaga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), membawahkan:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi;
 - Seksi Pengendalian Mutu.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Promosi dan Kemasan (RPK), membawahkan:

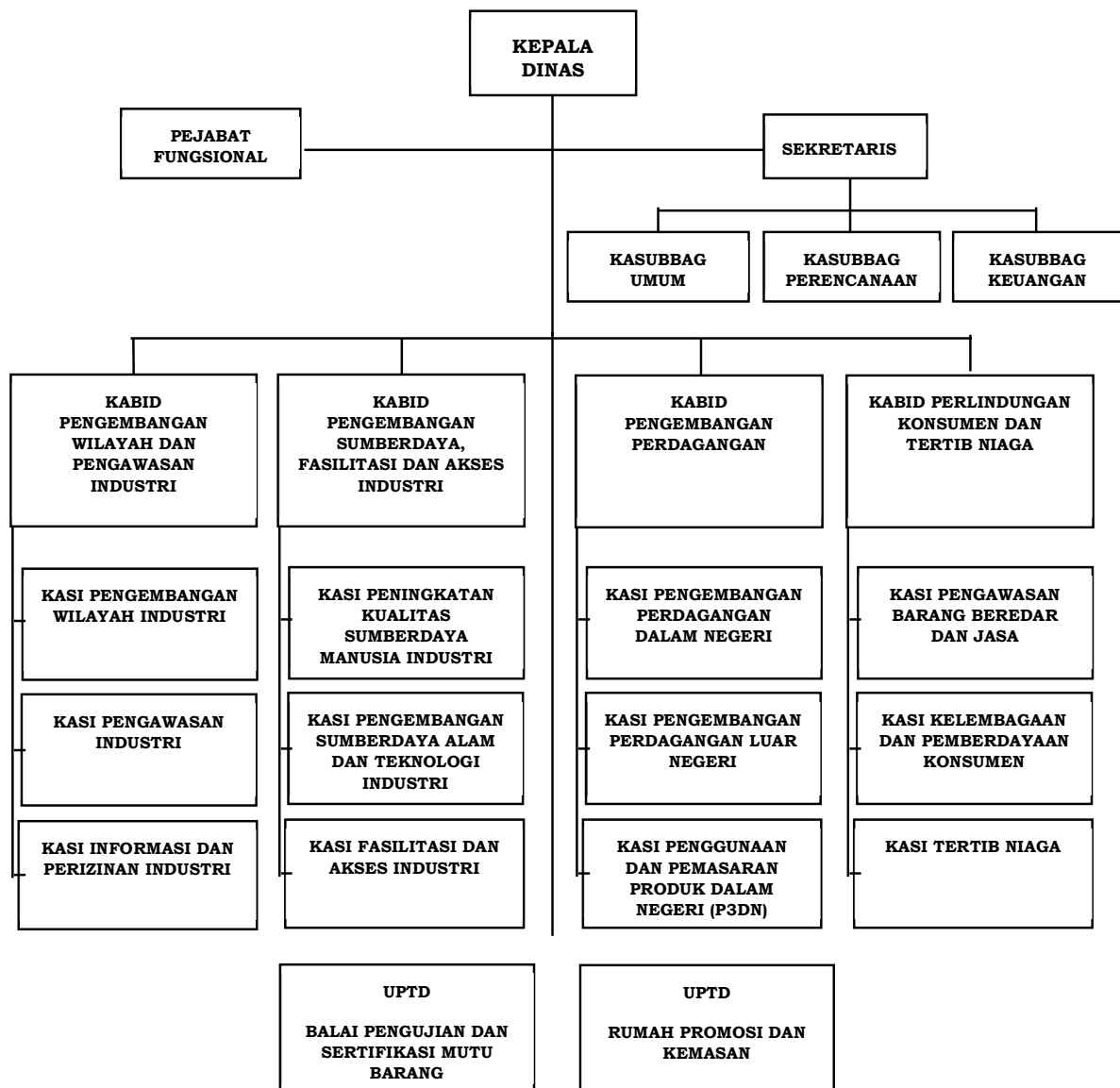
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan Teknis Pengawasan dan Produksi;
- Seksi Promosi.

i. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD

- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- Penguji Mutu Barang

Terlampir bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

1.3.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berdasarkan pendistribusian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JABATAN			KET
			L	P	STRUKTURAL	JFU	JFT	
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	72 Orang	41	31	21	39	12	
2	UPTD BPSMB	16 Orang	7	9	4	7	5	
3	UPTD RPK	6 Orang	5	1	4	2	0	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tabel 1.2. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	PENDIDIKAN									
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA / Sederajat	SLTP	SD
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	9	43	0	12	0	0	8	0	0
2	UPTD BPSMB	0	3	7	0	4	0	0	2	0	0
3	UPTD RPK	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tabel 1.3. Jumlah ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	GOLONGAN												
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1	0	2	5	17	15	13	9	7	2	1	0
2	UPTD BPSMB	0	0	0	0	2	1	3	5	2	1	2	0	0
3	UPTD RPK	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1.3.2.2 Asset SKPD

Asset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terlampir bagan tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN: 1. Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Perencanaan Kinerja dimulai dari agenda penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Sehubungan dengan penetapan Visi tersebut, telah ditetapkan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor

pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan , serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan

setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.

- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan dan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, maka Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya harus mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Misi ke-1 (satu) yaitu : **Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;** pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan , serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah, Misi ke-5 (lima) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;** tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel II.1 dan tabel II.2

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3 % (tingkat kenaikan harga)	< 3	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
3.	Mengembangkan Kinerja Ekspor	Nilai Ekspor Bersih (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan Kasus Pengaduan(%)	25	25	50	50	50
5.	Peningkatan PAD	Peningkatan nilai retribusi (%)	80	15	50	50	50
6.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	100	100	100
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase Peningkatan Industri (%)		5	5	5	5
2.	Pengendalian Stabilitas Harga	Stabilitas Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Penting		<2.5%	<2.5%	<2.5%	<2.5%
3.	Peningkatan Keberdayaan Konsumen dan Kepatuhan Pelaku Usaha	Kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen dan Persentase Ketaatan Pelaku Usaha		37 ; 17,5%	40 ; 28,5%	45 ; 39%	50 ; 50 %
4.	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Penerimaan Retribusi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Industri Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertanian (%)	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase pertumbuhan industri sektor Kelautan dan Perikanan (%)	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan industri sektor Pariwisata (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%)	0	0	5	0	5
	Meningkatnya tenaga Kerja Industri	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Persentase pertumbuhan kawasan industri (%)	0	20	20	20	40
		persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Selat Nasik (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)					
persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)							

	Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.	15	15	15	15	15
2.	Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)	100;11	100;11	100;11	100;11	100;11
	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	<11	<11	<11	<11
	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)	87	92	94	96	98
3.	Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)	5	5	5	5	5
5.	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertanian (%)	80	10	5	5	5
		Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertambangan (%)	0	5	45	45	45
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan	100	100	100	100	100
1	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)		9.157.209.890	14.157.209.890	16.157.209.890	17.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri		0.82	1.37	1.58	1.68

2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan		1.15	1.15	1.15	1.15
3	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)		1.668.488.999,16	1.835.337.899,07	2.018.871.688,98	2.220.758.857,88
4	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)		<11	<11	<11	<11
5	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas		35%	57%	78%	100%
6	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen		2	3	5	5
7	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		146	10	10	10
8	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)		100	100	100	100

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah		
No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan

		Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang
		Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri
2.	Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan
3.	Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional
4.	Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)	Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
5.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
6.	Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis
7.	Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru	Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah
8.	Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri
9.	Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah
10.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga	Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas
11.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar (barang	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada pelaku usaha

	ilegal-bahan berbahaya-standar-dumping, dll	
12.	Menjamin mutu pelayanan tera dan tera ulang, kalibrasi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	mewujudkan lembaga kemetrolagian yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memperoleh pengakuan formal (akreditasi) secara nasional maupun internasional
13.	Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standardisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional	Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
14.	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui pelayanan sertifikasi dan pengendalian mutu	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor
15.	Membina dan melaksanakan koordinasi dengan PPMB, BSN, PUSTAND dan instansi terkait dalam kegiatan standardisasi dan pengendalian mutu	Menjaga kualitas produk ekspor unggulan Bangka Belitung melalui standardisasi dan manajemen mutu barang ekspor pada perusahaan pelaku ekspor
16.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi		
17.	Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerinah 2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor 3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur 4. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur 5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017-2022 yang mendasarkan pada program pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2017-2022. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu 2017-2022. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi indikator pada RPJMD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel II.4

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
						2018	2019	2020	2021	2022		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan		4,47	4,3	4,4	4,5				
					6,22	2,63	2,65	1,25				
				Persentase Pertumbuhan Industri (%)		5	5	5				
				Nilai Investasi Industri (Rp)			9.157.209.890	14.157.209.890				
				Persentase Tenaga Kerja Industri			0,82	1,37				
	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Masyarakat	Menurunnya Angka Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			1.890	1.940	1.980				
					6,75	06.42	06.31	06.24				
				Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan			1.15	1.15				
				Nilai Ekspor (US\$)			1.668.488.999,16	1.835.337.899,07				
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)			<11	<11				
				Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas			35%	57%				
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen			2	3				
							0,253	0,257				
									146	10		

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

No	TUJUAN RPJMD PERUBAHAN	SASARAN RPJMD PERUBAHAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi						4,50	4,55	4,55
		Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan					1,5	2,0	2,0	
			Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan					0,16	0,16	0,16	
			Persentase Pertumbuhan Perdagangan					0,031	0,033	0,033	
			Persentase Pertumbuhan Usaha Industri					1	1	1	
			Nilai Neraca Perdagangan						1.528.414.791	1.529.881.791	1.529.881.791

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ke-delapan indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.6. berikut ini:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran/ Perubahan
1.	Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri	(Rp)	14.157.209.890	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	99.576.274
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	4.070.619.455
		Persentase Tenaga Kerja Industri	%	1,37	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	24.707.786
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor	(US\$)	1.835.337.899	Program Pengembangan Perdagangan	30.500.125
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	%	<11	Program Pengembangan Perdagangan	629.679.481
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	%	1,15	Program Pengembangan Perdagangan	9.878.392
5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	%	10	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	2.610.790.000
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	%	57	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	51.740.000
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai	3	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	163.808.899

2.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

Nilai Investasi Industri

Capaian kinerja dari Nilai Investasi Industri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 4.170.195.729 dan realisasi sebesar Rp 3.804.142.463 atau 91,22 % yang terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Wilayah 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.830.975 dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.830.975 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 275.200.000)
- b. Kegiatan Pembinaan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.340.400 dan realisasi anggaran sebesar Rp 17.340.400 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 131.240.000)
- c. Kegiatan Pendataan Perizinan Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.950.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp

3.950.000 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 101.320.000)

- d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.454.899 dan realisasi anggaran sebesar Rp 53.935.699 atau 90,72%. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 105.050.000)

dan Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.155.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp 15.155.500 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 418.365.000)
- b. Kegiatan Rumah Pengembangan Produk, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.242.390.195 dan realisasi anggaran sebesar Rp 226.195.620, - atau 88,34%. (kegiatan ini mengalami Pengurangan pada Perubahan APBD-P yang semula dianggarkan Rp 1.615.570.000)
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan OVOP, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 92.475.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 91.510.749 atau 98,96%.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 713.967.245 dan realisasi anggaran sebesar Rp 636.622.075 atau 89,17%. (kegiatan ini mengalami Pengurangan pada Perubahan APBD-P yang semula dianggarkan Rp 951.475.000)
- e. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.631.515 dan realisasi anggaran sebesar Rp 106.398.815 atau 99,78%. (kegiatan ini mengalami Pengurangan pada Perubahan APBD-P yang semula dianggarkan Rp 230.180.000)

a. Kegiatan Pemberdayaan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan bagi UMKM Terdampak Covid-19, kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.900.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.762.915.165 atau 92,79%. (kegiatan ini merupakan kegiatan stimulus penanganan dampak covid-19 yang bersumber dari dana DID)) Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Nilai Investasi Industri adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 4.170.195.729 / 14.157.209.890) \times 186.797.290.000) - \text{Rp } 3.804.142.463$$

$$= \text{Rp } 51.219.500.402$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Nilai Investasi Industri dapat dikatakan terjadi efisiensi sebesar Rp 51.219.500.402 atau dengan persentase capaian 1319,45%.

Persentase Tenaga Kerja Industri

Capaian kinerja dari Persentase Tenaga Kerja Industri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.707.786 dan realisasi anggaran sebesar Rp 24.707.786 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 554.950.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Tenaga Kerja Industri adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 24.707.786 / 1,37\%) \times 7,98\%) - \text{Rp } 24.707.786$$

$$= \text{Rp } 119.184.795$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Tenaga Kerja Industri dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 22.605.800, - atau dengan persentase capaian 582,48%.

Nilai Ekspor

Capaian kinerja dari Nilai Ekspor di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan: Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.500.125 dan realisasi anggaran sebesar Rp 28.651.375 atau 93,94%. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 148.725.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Nilai Ekspor adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 30.500.125 / 1.835.337.899,07) \times 1.203.105.606,54) - \text{Rp } 28.651.375 \\ &= \text{Rp } -8.657.852 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Nilai Ekspor dapat dikatakan terjadi infisiensi sebesar Rp -8.657.852 atau dengan persentase capaian 65,55%.

Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)

Capaian kinerja dari Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 629.679.481 dan realisasi sebesar Rp 435.020.381 atau 69,09% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 353.708.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 187.810.000 atau 53,10%.
- b. Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 275.971.481 dan realisasi anggaran sebesar Rp 247.210.381 atau 89,58%. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 2.080.650.080)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$$\begin{aligned}
 E/I &= ((Rp\ 629.679.481 / 11\%) \times 12,26\%) - Rp\ 435.020.381 \\
 &= Rp\ 266.786.022
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) dapat dikatakan terjadi efisiensi sebesar Rp 266.786.022 atau dengan persentase capaian 111,45%.

Persentase Sarana Perdagangan

Capaian kinerja dari Persentase Sarana Perdagangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan: Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.878.392 dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.878.392 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 93.750.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Tenaga Kerja Industri adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E/I &= ((Anggaran Kegiatan / Target Kinerja) \times Realisasi Kinerja) - Realisasi anggaran \\
 E/I &= ((Rp\ 9.878.392 / 1,15\%) \times 0\%) - Rp\ 9.878.392 \\
 &= Rp - 9.878.392
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Sarana Perdagangan dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp - 9.878.392 atau dengan persentase capaian 0%.

Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Capaian kinerja dari Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 2.610.790.000 dan realisasi sebesar Rp 2.156.462.547 atau 82,60% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM, kegiatan dilaksanakan oleh UPTD BSPM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.398.520.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.021.102.047 atau 84,24%. (kegiatan ini mengalami Penambahan pada Perubahan APBD-P yang semula dianggarkan Rp 640.520.000 untuk pengadaan peralatan Laboratorium pengganti dana DAK yang dibatalkan)

- b. Kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium, kegiatan dilaksanakan oleh UPTD BSPM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 212.270.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 135.360.500 atau 63,77%. (kegiatan ini mengalami Pengurangan pada Perubahan APBD-P yang semula dianggarkan Rp 270.270.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$E/I = ((\text{Rp } 2.610.790.000 / 910\%) \times 6,17\%) - \text{Rp } 2.156.462.547$

$= \text{Rp } -545.605.117$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp -545.605.117 atau dengan persentase capaian 61,70%.

Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas

Capaian kinerja dari Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.740.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 51.665.000 atau 99,86%. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 210.140.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$E/I = ((\text{Rp } 51.665.000 / 57\%) \times 40\%) - \text{Rp } 51.665.000$

= Rp -15.356.228

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp -15.356.228 atau dengan persentase capaian 70,18%.

Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Capaian kinerja dari Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 163.928.900 dan realisasi sebesar Rp 163.808.899 atau 99,93% yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.579.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp 32.579.500 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 116.875.000)
- b. Kegiatan Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.000.000 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 80.850.000)
- c. Kegiatan Pos Layanan Pengaduan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.849.400 dan realisasi anggaran sebesar Rp 119.729.399 atau 99,90 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 199.370.000)
- d. Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.500.000 atau 100,00 %. (kegiatan ini mengalami refocusing covid-19 yang semula dianggarkan Rp 81.280.000)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 163.928.900 / 3\%) \times 3,34\%) - \text{Rp } 163.808.899$$

= Rp 18.698.610

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 18.698.610 atau dengan persentase capaian 111,33%.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi dapat dilihat dengan melihat hasil dari Pengukuran dan Penilaian Kinerja. Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa : indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Evaluasi kinerja tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kesesuaian antara Rencana Kerja Tahunan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diukur tingkat capaian kinerja berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil) dari kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Hingga akhir tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dapat dilihat, sebagai berikut:

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2020 (eselon II) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2020
(eselon II)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	14.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1,37%
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (US\$)	1.835.337.899
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1,15%
5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10%
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	57%
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	14.157.209.890	186.797.290.000	1319,45%
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1,37%	7,98%	582,48%
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (US\$)	1.835.337.899	1.203.105.606,54	65,55%
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	9,74	111,45%
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1,15%	0	0,00%

5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10%	6,17%	61,67%
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	57%	40,00%	70,18%
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3	3,34	111,33%
Total Rata-rata capaian sasaran					295,96%

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian (%) 2019	Capaian (%) 2020	+/_ (%)
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	0,54%	30047,05%	30046,51%
		Persentase Tenaga Kerja Industri	680,49%	582,48%	-98,01%
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (US\$)	83,52%	65,55%	-17,97%
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	108,18%	111,45%	3,27%
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	91%	107,24%	-29,78%
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	100%	70,18%	-29,82%
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	100%	111,33%	11,33%

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra 2017-2022

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020	Realisasi (%) 2020
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	14.157.209.890	4.253.824.484.802
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1,37%	7,98%
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (US\$)	1.318.136.726,00	1.203.105.606,54
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	9,74
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1,15%	0
5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	10%	6,17%
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	57%	40,00%
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3	3,34

Sasaran 1: Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Investasi Industri dan Persentase Tenaga Kerja Industri

Target Kinerja Tahun 2020: Nilai Investasi Industri Rp 14.157.209.890 dan Persentase Tenaga Kerja Industri 1,37%

Realisasi Perolehan Nilai Investasi Industri Tahun 2020 sebesar Rp 186.797.290.000 atau mencapai sebesar 1319,45%, hal ini dikarenakan mulai tertibnya industry dalam pendataan Sistem Informasi Industri Nasional sehingga yang dahulunya kurang tertib mulai terdata dengan baik. Sedangkan Persentase Tenaga Kerja Industri tumbuh sebesar 7,98% melebihi yang di targetkan 1,37% atau memperoleh capaian 582,48%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri	(Rp)	14.157.209.890	186.797.290.000	1319,45
	Persentase Tenaga Kerja Industri	%	1,37	7,98	582,48

Sasaran 2: Meningkatnya Nilai ekspor

Indikator Kinerja : Nilai Ekspor

Target Kinerja Tahun 2020: Nilai Ekspor (US\$) 1.835.337.899

Realisasi Perolehan Nilai Ekspor Tahun 2020 sebesar US\$ 1.203.105.606,54 sedikit dibawah target US\$ 1.835.337.899 atau hanya mencapai sebesar 65,55%, hal ini dikarenakan Penurunan dan pembatasan permintaan barang dari luar negeri karena pelaku usaha di luar negeri membatasi produksi akibat pandemi Covid-19 sehingga perolehan Nilai Ekspor turun 8,73% dari tahun 2019 US\$ 1.318.136.726.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor	(US\$)	1.835.337.899	1.203.105.606,54	65,55

Sasaran 3: Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

Indikator Kinerja : Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)

Target Kinerja Tahun 2020: Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) <11%

Realisasi Perolehan koefisien variasi Tahun 2020 sebesar 9,74% sesuai target yang harus dicapai dibawah atau <11% jadi untuk capaian target koefisien variasi mencapai 111,45%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	%	<11	9,74	111,45

Sasaran 4: Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan

Indikator Kinerja : Persentase Sarana Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2020: Persentase Sarana Perdagangan 1,15%

Realisasi Perolehan Persentase Sarana Perdagangan Tahun 2020 sebesar 0% tidak sesuai target 1,15%, hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang menambah sarana perdagangan.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	%	1,15	0	0

Sasaran 5: Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Target Kinerja Tahun 2020: Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 90%

Realisasi Perolehan Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Tahun 2020 sebesar 6,17% atau hanya mencapai sebesar 61,67%. Diharapkan peningkatan contoh sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menghasilkan penambahan ruang lingkup pengujian yang diharapkan pada tahun 2021 ini akan meningkat karna pada tahun 2020 dilakukan penambahan alat pengujian.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	%	10	6,17	61,67

Sasaran 6: Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha

Indikator Kinerja : Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas

Target Kinerja Tahun 2020: Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas 35%

Realisasi Perolehan koefisien variasi Tahun 2019 sebesar 40% sesuai target yang harus dicapai 57% jadi untuk capaian indicator ini mencapai 70,17%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini mengalami refocusing sehingga dari yang di targetkan 10 pelaku usaha, hanya bisa dilakukan 4 saja.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	%	57	40	70,18

Sasaran 7: Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Indikator Kinerja : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Target Kinerja Tahun 2020 : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen 3

Realisasi Perolehan Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2019 peningkatan indeks 3,34 sesuai target yang harus dicapai 3 jadi untuk capaian indicator ini mencapai 111,33%. Ditargetkan pada tahun 2020 Indeks Keberdayaan Konsumen pada nilai 40 (Paham) dan hasil yang diperoleh 43,34 (Mampu)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai	3	3,34	111,33

3.2. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

a. Target dan capaian program

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi (%) 2020	Capaian	Ket
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	3	3	
		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	
2	Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	Ton	430.453,83	354.416,37 (*)	Penurunan dan pembatasan permintaan barang dari luar negeri karena pelaku usaha di luar negeri membatasi produksi akibat pandemi Covid-19
						Alokasi Anggaran untuk peningkatan kapasitas eksportir dan calon eksportir dan perluasan pasar ke luar negeri belum memadai untuk mencapai target ekspor, terutama karena adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19
		Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang	Persen	100	100	

		tersedia Setiap Waktu				
3	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (112 Barang SNI wajib)	Persen	18	18	
		Indeks Keberdayaan Konsumen (0-20=sadar, 21-40=paham, 41-60=mampu, 61-80= kritis, 81-100= berdaya)	Nilai Indeks	40	43,34	
4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	Persen	33,33	42	
5	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	Persentase SIKIM	Persen	28	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di reconfusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
		Persentase Kawasan Industri	Persen	25	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di reconfusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
6	Program Pengembangan Sumberdaya , Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase Produk Industri yang berdaya saing	Persen	20	20	
		Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri	Persen	20	20	

b. Target dan capaian kinerja kegiatan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi (%) 2020	Capaian	Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	orang	130	130	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	orang	130	130	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	orang	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di refofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%	Dokumen	4	4	
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90 %	Jenis Dokumen	5	5	
6	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pasar Murah dilaksanakan	Kali	50	26	Dengan adanya pandemi Covid-19 , maka untuk kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2020 ini tergantung dari kesiapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindag yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kot a dengan Koordinasi

					<p>dengan Tim Gugus Covid-19 di masing masing Kabupaten/Kota</p>
					<p>Dengan adanya pandemic Covid-19 ini, banyak Distributor yang takut dan khawatir dengan kesehatan dan keselamatan karyawan mereka jika berpartisipasi pada kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah Tahun 2020.</p>
					<p>Adanya kekosongan barang di distributor seperti komoditi gula dan daging beku.</p>
					<p>Pada masa Pandemi Covid-19 ini, daya beli masyarakat agak berkurang, hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian masyarakat di Bangka Belitung, dimana sumber mata pencaharian masyarakat dari komoditi lada dan timah, untuk harga jualnya mengalami penurunan di</p>

						masa Pandemi Covid-19 ini.
7	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	23	23	
8	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah Fasilitas Akses Pasar	Unit	4	4	
9	Peningkatan Kemampuan SDM dan Produk	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha Yang Terlatih	Pelaku Usaha	10	10	
10	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang Beredar yang diawasi	Barang	4	4	
11	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten /Kota	1	1	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di refofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
12	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Konsumen	Orang	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di refofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
13	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	Pengaduan	20	108	
14	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta	Orang	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di

						recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
15	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah Pegawai	Orang	23	23	
16	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah Lingkup Akreditasi	Ruang Lingkup	2	2	Belanja akreditasi tidak dapat cairkan terkait aturan dari KAN bahwa biaya keanggotaan /reakreditasi dapat dibayarkan setelah minimal 6 bulan diterima reaktreditasi Kurangnya Kompetensi Personil UPTD BPSMB dan Sarana dan Prasarana Penujang untuk Penambahan ruang lingkup pengujian
17	Pengembangan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	Dokumen	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
18	Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Persentase Kawasan Industri	Persen	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di recofusing dan relokasi anggaran untuk percepatan

		Persentase SIKIM				penanganan Covid-19.
19	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku Yang di Susun	Buku	1	1	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di reconfusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
20	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Industri Yang di Awasi	Industri	20	20	Beberapa Perusahaan di Bangka Belitung merupakan anak perusahaan yang kantor pusatnya berada di Jakarta sehingga SOP Administrasi perusahaan dalam hal penyampaian data harus menunggu koordinasi dan persetujuan dari pusat sehingga data yang disampaikan tidak dapat diambil pada saat tim turun kelapangan. Masih ada Perusahaan industri yang masih belum memahami dan menerapkan PP No 02 Tahun 2017 pasal 48 tentang kewajiban penyampaian data melalui SIINAS.

21	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih	Pelaku Industri/masyarakat	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di reconfusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
22	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Produk industri yang terfasilitasi Perizinan	Produk	0	0	Adanya pandemic Covid-19 sehingga kegiatan ini di reconfusing dan relokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
23	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah kemasan produk industri yang terfasilitasi	Kemasan	400	400	
24	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP	IKM OVOP	16	16	Dalam melaksanakan pembinaan OVOP terdapat kendala di mana COVID-19 telah menurunkan daya saing IKM OVOP Bangka Belitung.
25	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	Pelaku Industri	350	350	Untuk Pemberdayaan Dekranasda, pameran yang rutin diikuti oleh perajin sebagai agenda tahunan ditiadakan

26	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Teknolgi Tepat Guna	TTG	2	2	IKM kesulitan untuk mendapatkan teknologi mesin pengolahan yang tepat guna dan kurangnya kemampuan Pemerintah dalam memberikan fasilitasi bantuan peralatan dan mesin produksi dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah serta masih belum pahamnya IKM dalam melaksanakan SOP pengajuan bantuan mesin dan peralatan
27	Pemberdayaan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan bagi UMKM terdampak Covid-19	Jumlah Kemasan produk terfasilitasi	Kemasan	5000	5000	Proses Produksi Kemasan yang akan diserahkan ke masyarakat belum maksimal karena kurangnya tenaga (personil) / Operator.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Belanja	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	12.285.197.779	11.984.610.979	11.656.561.724	89,33
Belanja Langsung	14.835.268.580	10.012.502.970	8.944.446.472	97,26
Total Belanja	27.120.466.359	21.997.113.949	20.601.008.196	93,65

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Kode	Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	Keuangan	%
	01.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.321.082.557	2.270.109.629	97,80
1	01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.058.525.350	2.017.461.349	98,01
2	01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	156.770.953	151.462.026	96,61
3	01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.750.000	1.750.000	46,67
4	01.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.612.954	68.013.254	99,13
5	01.05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	33.423.300	31.423.000	94,02
	02	Program Pengembangan Perdagangan	670.057.998	473.550.148	70,67
6	02.01	Pelaksanaan pasar Murah	353.708.000	187.810.000	53,10
7	02.02	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	30.500.125	28.651.375	93,94
8	02.05	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	275.971.481	247.210.381	89,58
9	02.06	Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	9.878.392	9.878.392	100,00
	03	Program Pengembangan Wilayah dan Pegawasan Industri	99.576.274	94.057.074	94,46
10	16.01	Pengembangan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra	18.830.975	18.830.975	100,00

11	16.02	Pembinaan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra	17.340.400	17.340.400	100,00
12	16.03	Pendataan Perizinan Industri	3.950.000	3.950.000	100,00
13	16.04	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	59.454.899	53.935.699	90,72
	04	Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri	4.095.327.241	3.734.793.175	91,20
14	17.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	24.707.786	24.707.786	100,00
15	17.02	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	15.155.500	15.155.500	100,00
16	17.03	Rumah Pengembangan Produk	1.242.390.195	1.097.483.085	88,34
17	17.04	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	92.475.000	91.510.749	98,96
18	17.05	Pemberdayaan Dekranasda	713.967.245	636.622.075	89,17
19	17.06	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	106.631.515	106.398.815	99,78
20	17.19	Pemberdayaan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan bagi UMKM Terdampak Covid-19	1.900.000.000	1.762.915.165	92,79
	05	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	215.668.900	215.473.899	99,91
21	18.01	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	51.740.000	51.665.000	99,86
22	18.02	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	32.579.500	32.579.500	100,00
23	18.03	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	4.000.000	4.000.000	100,00
24	18.04	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	119.849.400	119.729.399	99,90
25	18.05	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	7.500.000	7.500.000	100,00
	06	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	2.610.790.000	2.156.462.547	82,60
26	19.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	2.398.520.000	2.021.102.047	84,26
27	19.02	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	212.270.000	135.360.500	63,77
		Total Nilai Belanja Langsung	10.012.502.970	8.944.446.472	89,33
		Total Nilai Belanja Tidak Langsung	11.984.610.979	11.656.561.724	97,26
		Total Nilai Belanja SKPD	21.997.113.949	20.601.008.196	93,65

Didukung Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Dekonsentrasi Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No	Kementerian	Kode Satker	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Perindustrian	309028	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	1.201.215.000	1.193.002.633	99,32
	Perdagangan	309144	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	797.834.000	642.990.000	80,59
	Perdagangan	309025	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	236.942.000	219.509.074	92,64
Total				2.235.991.000	2.055.501.707	91,93

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Gambaran tentang Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Tahun 2020 ini adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2020 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2021. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2020 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi RPJMD dan Renstra 2017 - 2022 dapat dicapai pada akhir masa jabatannya.

Selama tahun 2020 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain :

1. Pandemi covid-19 mewarnai kegiatan tahun 2020 sehingga beberapa kegiatan mengalami refocusing, dan juga turunnya aktifitas dari beberapa industry dan permintaan perdagangan baik dalam maupun luar negeri;
2. Tidak terjadinya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dikarenakan tidak ada penambahan dan pembangunan sarana dan prasarana selama masa pemulihan dari pandemic covid-19 tetapi lebih pada pengelolaannya untuk indikator Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun;
3. Menurunnya pencapaian Nilai Ekspor dikarenakan perolehan nilai ekspor sangat didominasi oleh ekspor timah, sehingga bila komoditi ini mengalami penurunan maka sangat berpengaruh pada perolehan nilai ekspor. Penurunan dan pembatasan permintaan barang dari luar negeri karena pelaku usaha di luar negeri membatasi produksi akibat pandemi Covid-19

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real;
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD;
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.
5. Melakukan evaluasi terhadap capaian dan target pada Renstra dan RPJMD 2017 – 2022.

LAMPIRAN

- Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Daftar Aset

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

KERTAS KERJA EVALUASI CAPAIAN KINERJA

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERDAGANGAN

NO.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	BOBOT	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	RASIO	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	$\frac{1.203.105.606,54 - 1.318.136.726,00}{1.318.136.726,00} \times 100\%$			(8,73) %			
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang		$\frac{9}{45} \times 100\%$			20 %			

	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk		43 ----- x 100% 100			43 %			
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor		10 ----- x 100% 30			33,33 %			
	Persentase Pelaku Usaha yang Menjadi Eksportir Baru		1 ----- x 100% 10			10 %			
2.		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen				100%			Ditangani dan diselesaikan Disperindag
	Jumlah penanganan pengaduan konsumen		108 + 0			108			Ditangani Disperindag

	Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha Yang Teredukasi		63 + 39			10			
3.		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	$\frac{222}{230} \times 100\%$			96,52%			
.	Jumlah Komoditi Potensial yang dipantau		1			1			Lada Putih (SNI 0004 2013)
	Indeks Kinerja BPSMB		2 + 1 + 1			4			Indeks SDM = 5 Indeks Contoh Uji = 230 Indeks Akreditasi = 2
4.		Tertib Usaha	0			0			Tidak ada toko bebas bea di wilayah Provinsi Kepulauan

									Bangka Belitung
	Persentasi SIUP Minuman Beralkohol (MB) Bebas Bea yang diterbitkan		0			0			Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Persentasi Rekomendasi SIUP MB Bagi Distributor yang diterbitkan		0			0			Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Persentase SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer yang diterbitkan		0			0			Surat Pernyataan
	Persentasi Penerbitan SIUP MB Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat		0			0			Bukan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu		940 ----- x 100% 940			100%			
5.		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	57.228,00 ----- x 100% 57.297,00			99,98%			
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terhadap Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida per tahun di Provinsi		0			0			Surat Pernyataan
6.		Persentase Barang Beredar yang diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan	4 ----- x 100% 51			7,8%			Pelumas Sparepart (Pelabelan)

		Perundang-undangan							Tabung Baja LPG (SNI 1452:2011) Ban Dalam Kendaraan (SNI)
	Jumlah Barang Beredar yang diawasi		51			51			
7.		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok				9,74%			
	Beroperasinya Pusat Distribusi yang Melayni Wilayah Provinsi a. Tersedianya Bangunan Pusat Distribusi b. Telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi		0			0			Surat Pernyataan

	c. Beroperasinya Pusat Industri d. Menguasai 20% Pangsa Pasar pada Komoditi yang ditangani								
	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu					9,74%			
	Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemendag		229 ----- x 100% 229			100%			

KERTAS KERJA EVALUASI CAPAIAN KINERJA

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERINDUSTRIAN

NO.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	BOBOT	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	RASIO	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	$\frac{53-50}{50} \times 100$			6 %			
2.		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan sector industry non migas 2. Kontribusi industry non migas terhadap PDRB 3. Nilai Ekspor produk industry non migas 			0+0+0+20+20 = 40			Point 1, 2, 3 menunggu release dari BPS

	Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan Dalam RPIP	<p>4. Jumlah Tenaga Kerja di sector industri pengolahan non migas</p> <p>Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Industri 2020 -----x 100%</p> <p>Target Jumlah Tenaga Kerja Industri dalam RPIP 58.551 ----- x 100% = 139.4 %</p> <p>42.000</p> <p>1. Nilai Investasi non migas akumulatif</p> <p>Realisasi Investasi Industri Non migas 2020 -----x 100%</p> <p>Target Nilai Investasi Non migas dalam RPIP 4.253.824.484.802 ----- x 100% = 425,39 %</p> <p>1.000.000.000.000</p>						
Persentase terselesaikannya Dokumen RPIP Sampai Dengan ditetapkannya Menjadi Perda		<p>Tersusunnya Naskah Dinas Akademin (30%)</p> <p>Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%)</p> <p>Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan Mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%)</p> <p>Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%)</p>			110%			

			Penetapan Perda RPIP (10%)						
3.		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	$\frac{20}{53} \times 100\%$			37,74%			
	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang diterbitkan		$\frac{0}{3} \times 100\%$			0%			Verifikasi Teknis

4.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	$\frac{0}{0} \times 100\%$								0%
	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Bagi Industri Besar yang diterbitkan		0							0%
5.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	$\frac{0}{0} \times 100\%$								0%

		Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dilokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait							
	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Provinsi		0			0%			
6.	Tersedianya Informasi Secara Lengkap dan Terkini	1) Keterkinian Informasi Industri : - Tersedianya Informasi Industri Dengan Batas Waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya Informasi Industri Dengan Batas Waktu 7-12 bulan (25%)				25%			

			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Menyampaikan Informasi Industri (0%) 2) Kelengkapan Informasi Industri Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Produksi dan Kapasitas Produksi (10%) - Informasi Bahan Baku dan Bahan Penolong (10%) 						
	Persentase Data Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota yang Masuk Dalam SIINAS Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota		29 ----- x 100% 53						54,7%

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Sunardi				
1.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.835.337.899,07	1.200.646.446,54	(Nilai Ekspor tahun N)
2.	Meningkatnya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	≤7,82	(koefisien variasi tahun N) < 11
3.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	14.157.209.890	14.157.209.890	(Nilai Investasi Industri Tahun N)
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1.37	1.37	Kerja tahun N-tahun N-1÷Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100
4.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3 (Nilai Indeks)	3 (Nilai Indeks)	Indeks pada Tahun N
5.	Peningkatan kepatuhan pelaku Usaha	Persentase Pelaku saha Yang memiliki legalitas	57%	57%	(Jumlah pelaku usaha tahun N-tahun N-1 ÷ Jumlah pelaku usaha tahun N-1)* 100
6.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Baran	Persentase Peningkatan Contoh sampel dari Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang	10	34	(Jumlah sampel tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah sampel tahun N –1)*100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Sunardi				
1.	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.835.337.899,07	1.200.646.446,54	(Nilai Ekspor tahun N)
2.	Meningkatnya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	≤7,82	(koefisien variasi tahun N) < 11
3.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	14.157.209.890	14.157.209.890	(Nilai Investasi Industri Tahun N)
		Persentase Tenaga Kerja Industri	1.37	1.37	Kerja tahun N-tahun N-1÷Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100
4.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	3 (Nilai Indeks)	3 (Nilai Indeks)	Indeks pada Tahun N
5.	Peningkatan kepatuhan pelaku Usaha	Persentase Pelaku saha Yang memiliki legalitas	57%	57%	(Jumlah pelaku usaha tahun N-tahun N-1 ÷ Jumlah pelaku usaha tahun N-1)* 100
6.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Baran	Persentase Peningkatan Contoh sampel dari Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang	10	34	(Jumlah sampel tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah sampel tahun N –1)*100
7.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan	100%	100%	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Deki Susanto				
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	100 %	(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100
		Predikat (NILAI) Sakip Perangkat Daerah	3	3	Nilai SAKIP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Deki Susanto				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	100 %	(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100
		Predikat (NILAI) Sakip Perangkat Daerah	3	3	Nilai SAKIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Aula Dedy Sayogo				
1.	Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Dengan Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4	1 Dokumen Renja, dan 1 Dokumen Renja Perubahan
2.	Tersedianya Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja	5	5	LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, IKM, CALK

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Aula Dedy Sayogo				
1.	Meningkatnya Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Dengan Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah	4	4	1 Dokumen Renja, dan 1 Dokumen Renja Perubahan
2.	Tersedianya Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5	5	LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, IKM, CALK
3.	Tersedianya Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi	12	12	Laporan Realisasi APBD dan APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Rita Wisna				
1.	Terlaksananya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen SPM	50	70	SPM yang di Terbitkan
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan CALK	2	2	CALK Semester I dan CALK Semester II
3.	Terlaksananya Pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Bukti Pengeluaran SPJ	2300	1840	SPJ Kegiatan
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan	24	24	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan Setiap Bulan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Rita Wisna				
1.	Terlaksananya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen SPM	50	70	SPM yang di Terbitkan
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan CALK	2	2	CALK Semester I dan CALK Semester II
3.	Terlaksananya Pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Bukti Pengeluaran SPJ	1500	1840	SPJ Kegiatan
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan	24	24	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan Setiap Bulan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Paizal Ruskamsyah				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang terlayani	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	132 Orang	130	Aparatur dan Pegawai Tidak Tetap yang dilayani Disperindag dan UPT BPSMB
2.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	39 Orang	0	Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktifitas Kantor dalam 12 Bulan	100 %	100%	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Novirawati				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang terlayani	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	130 Orang	130 Orang	Aparatur dan Pegawai Tidak Tetap yang dilayani Disperindag dan UPT BPSMB
2.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	0	0	Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktifitas Kantor dalam 12 Bulan	100 %	100 %	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Riza Aryani				
1.	Meningkatnya Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	18;25	18	(Barangdiawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa) * 100
2.	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 =Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100	40	43.34	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Fadjri Djagahitam				
1.	Meningkatnya Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	18	18	(Barangdiawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa) * 100
2.	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100	40	43,34	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Luciana				
1.	Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku	Jumlah Barang dan Jasa SNI wajib	16;2	4	(Barang dan Jasa SNI wajib diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa)*100
2.	Meningkatkan penegakan hukum pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)	2	0	Pelanggaran Yang di Tindaklanjuti Secara Hukum (kasus) Tahun N
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam tertib niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang tertib niaga	21	0	Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Rina Asrida				
1.	Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku	Jumlah Barang dan Jasa SNI wajib	4	4	(Barang dan Jasa SNI wajib diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa)*100
2.	Meningkatkan penegakan hukum pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum(kasus)	0	0	Pelanggaran Yang di Tindaklanjuti Secara Hukum (kasus) Tahun N
3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam tertib niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang tertibniaga	0	0	Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Zurista				
1.	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham; 41 - 60 = Mampu)	804	0	Jumlah Konsumen yang tereduksi
2.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	1	(Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang terbentuk) tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Zurista				
1.	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham; 41 - 60 = Mampu)	0	0	Jumlah Konsumen yang tereduksi
2.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen	Jumlah Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	1	(Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang terbentuk) tahun N
3.	Meningkatnya Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	20	108	Jumlah Pengaduan Konsumen tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Darma Kurniawan				
1.	Kalibrasi, Verifikasi dan Interkomparansi Sarana Prasarana LabStandarisasi dan Kemetrolgian	Sarana dan Prasarana Kemetrolgian	0	0	-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Armaini				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Terbangun	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)	1.15 %	0	(Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) * 100
2.	Meningkatnya Jumlah Volume Ekspor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	430.453,83	354.416,37	(Nilai Ekspor tahun N)
3.	Menstabilkan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	11:100	100	(Koefisien Variasi tahun N) <11

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Armaini				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Terbangun	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)	0	0	(Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) * 100
2.	Meningkatnya Jumlah Volume Ekspor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	430.453,83	354.416,37	(Nilai Ekspor tahun N)
3.	Menstabilkan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	100	100	(Koefisien Variasi tahun N) <11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Rosy Handayani				
1.	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan Komoditi	Jumlah Pelaku Usaha yang Terverifikasi dan Terawasi	50	23	Pelaku Usaha yang terverifikasi tahun N
2.	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memahami ekspor	Pelaku usaha yang memahami ekspor	55	0	Pelaku Usaha yang memahami ekspor tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Rosy Handayani				
1.	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan Komoditi	Jumlah Pelaku Usaha	23	23	Pelaku Usaha yang terverifikasi tahun N
2.	Meningkatnya Kemampuan SDM dan Produk	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Terlatih	10	10	Pelaku Usaha yang memahami ekspor tahun N
3.	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memahami ekspor	Pelaku Usaha yang Memahami Ekspor	0	0	Pelaku Usaha yang memahami ekspor tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Mardian. A. Zulkarnain				
1.	Terkendalinya pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Pasokan Barang Pokok dan Harga Barang Stabil	11	26	Pelaksanaan Pasar Murah tahun N
2.	Tersedianya informasi harga barang kebutuhan pokok dan baran penting	Barang Komoditi termonitor	40 ; 39	0	Informasi harga barang pokok dan penting tahun N
3.	Meningkatnya jumlah Gudang Komoditi, dan terbangunnya sistem pergudangan	Gudang yang terbangun	1	0	Gudang yang terbangun tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Mardian. A. Zulkarnain				
1.	Terkendalinya pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Pasokan Barang Pokok dan Harga Barang Stabil	50	26	Pelaksanaan Pasar Murah tahun N
2.	Meningkatnya jumlah Gudang Komoditi, dan terbangunnya sistem pergudangan	Gudang yang terbangun	0	0	Gudang yang terbangun tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Wisniarti				
1.	Terkendalinya Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Pelaku usaha, distributor	60	0	Pelaku Usaha dan Distributor tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Wisniarti				
1.	Terkendalinya Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Pelaku usaha, distributor	0	0	Pelaku Usaha dan Distributor tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Moch. Nasirin Yusuf. EF				
1.	Meningkatnya Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	Persentase Komoditi Unggulan Daerah yang diuji dan memenuhi Standar Pengujian	33%	42%	Jumlah Komoditi Unggulan Daerah yang diuji dan memenuhi Standar Pengujian tahun N
		Nilai Retribusi	300.000.000		Nilai Retribusi tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Moch. Nasirin Yusuf. EF				
1.	Meningkatnya Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	Persentase Komoditi Unggulan Daerah yang diuji dan memenuhi Standar Pengujian	33,33%	42%	Jumlah Komoditi Unggulan Daerah yang diuji dan memenuhi Standar Pengujian tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Herdian				
1.	Meningkatnya Jumlah contoh Pengujian Komoditi Daerah	Jumlah contoh Komoditi Daerah	360	0	contoh Komoditi Daerah tahun N ÷ Total Komoditi dan besaran) * 100

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Herdian				
1.	Meningkatnya Jumlah contoh Pengujian Komoditi Daerah	Jumlah contoh Komoditi Daerah	0	0	contoh Komoditi Daerah tahun N ÷ Total Komoditi dan besaran) * 100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Novi Puspita				
1.	Meningkatkan Status Akreditasi dan menambah mutu produkyang di uji	Jumlah Lingkup Akreditasi	1	2	Status Akreditasi Laboratorium tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Ikhsania Suhartini				
1.	Meningkatkan Status Akreditasi dan menambah mutu produk yang di uji	Jumlah Lingkup Akreditasi	2	2	Status Akreditasi Laboratorium tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Hartini				
1.	Meningkatnya Pelayanan Aparatur	Peningkatan Layanan	23	23	Jumlah Pegawai Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Wira Purnama				
1.	Meningkatkan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Jenis Persentase Kawasan Industri dan SIKIM	25 : 28	0	Kawasan Industri dan SIKIM Pada tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Wira Purnama				
1.	Meningkatkan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Jenis Persentase Kawasan Industri dan SIKIM	25:28	0	Kawasan Industri dan SIKIM Pada tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Muhamad Rizal				
1.	Meningkatnya Jumlah Kawasan Industri dan SIKIM	Jumlah Kawasan Industri dan SIKIM Terbentuk	1 ; 2	0	Kawasan Industri dan SIKIM Yang Terbentuk Pada Tahun N
2.	Ketersediaannya Data Kawasan Industri, SIKIM dan RPIK	Jumlah Dokumen Yang di Tetapkan	2	0	Dokumen yang ditetapkan Pada Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Muhamad Rizal				
1.	Meningkatnya Jumlah Kawasan Industri dan SIKIM	Jumlah Kawasan Industri dan SIKIM Terbentuk	0	0	Kawasan Industri dan SIKIM Yang Terbentuk Pada tahun N
2.	Ketersediaannya Data Kawasan Industri, SIKIM dan RPIK	Jumlah Dokumen Yang di Tetapkan	0	0	Dokumen yang ditetapkan Pada Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Ari Masdan				
1.	Meningkatkan Jumlah Industri Yang Go Internasional	Jenis Industri Yang Go Internasional	9	0	Industri Yang Go Internasional Pada Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Ari Masdan				
1.	Meningkatkan Jumlah Industri Yang Go Internasional	Jenis Industri Yang Go Internasional	9	0	Industri Yang Go Internasional Pada Tahun N
2.	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun	1	1	Buku yang disusun Pada Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Tri Susanyati				
1.	Meningkatkan Jumlah Industri Yang Memenuhi Standar Kelayakan Industri	Jenis Industri Memenuhi Standar Kelayakan	15	20	Industri Yang Memenuhi Standar Kelayakan Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Tri Susanyati				
1.	Meningkatkan Jumlah Industri Yang Memenuhi Standar Kelayakan Industri	Jenis Industri Memenuhi Standar Kelayakan	20	20	Industri Yang Memenuhi Standar Kelayakan Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Subekti Saputra				
1.	Meningkatnya Produk Industri Yang Berdaya Saing	Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing	20	20	$(\text{Jumlah Industri KP Tahun N} \div \text{Jumlah Industri Kp Tahun N - 1}) * 100$
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri	20	20	$(\text{Jumlah Tenaga Kerja Industri Tahun N} \div \text{Jumlah Total Tenaga Kerja Tahun N}) * 100$

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Subekti Saputra				
1.	Meningkatnya Produk Industri Yang Berdaya Saing	Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing	20	20	$(\text{Jumlah Industri KP Tahun N} \div \text{Jumlah Industri Kp Tahun N - 1}) * 100$
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri	20	20	$(\text{Jumlah Tenaga Kerja Industri Tahun N} \div \text{Jumlah Total Tenaga Kerja Tahun N}) * 100$

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Yoharman				
1.	Meningkatnya Produk Industri Yang Bersertifikasi OVOP	Jumlah Produk OVOP	9	16	Produk OVOP Yang Tersertifikasi Tahun N
2.	Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, dan Diversifikasi Produksi	Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG)	4	2	Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang Tersertifikasi Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Muhammad Nazli				
1.	Meningkatnya Produk Industri Yang Bersertifikasi OVOP	Jumlah Produk OVOP	16	16	Produk OVOP Yang Tersertifikasi Tahun N
2.	Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, dan Diversifikasi Produksi	Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG)	2	2	Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang Tersertifikasi Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Marhoto				
1.	Meningkatkan Produk Industri yang Terstandarisasi	Jumlah Produk Yang Memenuhi Standarisasi (PIRT, HKI, Uji Nutrisi)	475	0	Pelaku Industri yang Terstandarisasi Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Yoharman				
1.	Meningkatkan Produk Industri yang Terstandarisasi	Jumlah Produk Yang Memenuhi Standarisasi (PIRT, HKI, Uji Nutrisi)	0	0	Pelaku Industri yang Terstandarisasi Tahun N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Dian Novita				
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Yang dilatih	Jumlah SDM Yang Terlatih	1000	0	SDM Yang Terlatih Tahun N

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	Dian Novita				
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Yang dilatih	Jumlah SDM Yang Terlatih	0	0	SDM Yang Terlatih Tahun N

Daftar Aset



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kab./Kota : -
 Bidang : Bidang Perindustrian
 Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 U P B : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	18.355.836.194,32
1	TANAH	123.373.746,00
1.01	TANAH	123.373.746,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.123.291.635,50
2.01	ALAT BESAR	210.020.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.007.064.500,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.189.379.430,00
2.04	ALAT PERTANIAN	191.461.500,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.710.272.988,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	621.560.300,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17.223.800,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	8.105.526.492,50
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.070.782.625,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.942.320.812,82
3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.942.320.812,82
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	166.400.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	166.400.000,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	450.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	450.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	297.553.000,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Printed By SimDd



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
U P B : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	297.553.000,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	297.553.000,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 2 dari 2

Printed By Simo



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093 Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093 email : perindag@babelprov.go.id